

## **BAB II**

### **AMNESTY INTERNATIONAL SEBAGAI SOCIAL MOVEMENT NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION DALAM MENGADVOKASI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI DUNIA**

Di era modern ini kasus pelanggaran hak asasi manusia masih saja terjadi di berbagai belahan dunia. Isu pelanggaran hak asasi manusia sudah bukan lagi menjadi masalah domestik karena terkadang permasalahan yang terjadi melibatkan banyak negara dan aktor lainnya. Di dalam bab ini akan memuat analisis kehadiran *amnesty international* sebagai salah satu NGO internasional yang aktif memperjuangkan hak-hak manusia apabila terjadi pelanggaran. Analisis di dalam bab ini akan dibagi kedalam tiga bagian, yang pertama akan memuat pengenalan dan latar belakang *amnesty international* sebagai NGO internasional. Dibagian kedua akan menampilkan agenda *amnesty international* dalam kasus pelanggaran HAM di dunia. Sedangkan di bagian ketiga akan memuat analisis aktivitas *amnesty international* sebagai *social movement NGO* dengan menggunakan konsep *non-governmental organization* strategi keempat oleh David Korten.

#### **A. Gambaran Singkat Amnesty International**

##### **1. Sejarah Terbentuknya Amnesty International**

Berdirinya *amnesty international* bermula saat seorang pengacara dari Inggris bernama Peter Benenson menerbitkan artikel dengan judul “*The Forgotten Prisoner*” yang merupakan respon terhadap kasus dipenjarakannya dua mahasiswa Portugis karena melakukan toa kebebasan di tahun 1961[CITATION Tom021 \l 1033 ]. Tulisan Peter Benenson tersebut diterbitkan di koran *The Observer* dan menyebarluas ke banyak negara memancing respon masyarakat internasional untuk menyuarakan keadilan dan kebebasan. Kejadian inilah yang menjadi titik awal terbentuknya *Amnesty International*. Artikel berjudul “*The Forgotten Prisoner*” dicetak ulang di banyak negara dengan mengkampanyekan pembelaan terhadap

kasus pelanggaran hak asasi manusia (Willets P., 1998). Hasilnya pada Juli 1961 delegasi berbagai negara bertemu dan mulai membentuk *Amnesty International* dengan gerakan awal untuk membebaskan tahanan politik atas dasar kemanusiaan. Pada tanggal 10 Desember 1961, lilin amnesti dinyalakan di depan St Martins Field di London untuk memperingati hari Hak Asasi Manusia dan *Amnesty Internatioanl* memulai misinya dengan mengirimkan delegasi untuk melakukan lobi dengan pemerintah lokal untuk membebaskan tahanan politik [CITATION Pet11 \ 1033 ]. Selain hal itu, *amnesty international* juga mengirimkan surat kepada tahanan politik di berbagai dunia untuk selalu memperjuangkan hak asasi manusia yang terlindas oleh elit politik. Setelah mereka bebas dari penjara akhirnya banyak dari mantan tahanan politik ini bergabung dengan *amnesty internasional* untuk turut serta dalam perjuangan pembelaan hak asasi manusia di berbagai belahan dunia. Meskipun sudah berdiri sejak tahun 1961. *Amnesty international* baru memiliki kantor kesekretariatan di London pada tahun 1963, dua tahun setelah *amnesty international* terbentuk. Tidak berselang lama, Sean Mac Bride, salah satu pendiri *amnesty international* menerima penghargaan nobel perdamaian atas jasanya memperjuangkan hak asasi manusia di dunia, sejak saat itu *amnesty international* semakin menambah jangkauannya di dunia dan mulai dikenal sebagai salah satu organisasi non-profit internasional atau INGO yang berpengaruh pada saat itu. Hanya berselang satu dekade setelahnya, di tahun 1971 *amnesty international* sudah memiliki lebih dari 1000 kelompok relawan di 28 negara, di tahun 1977 *amnesty international* sudah memiliki 1874 kelompok relawan di 33 negara dan jumlah ini terus bertambah [ CITATION Med18 \ 1033 ].

Setelah dinyalakannya lilin amnesti pada tahu 1961, dimulailah perjuangan Amnesty International dalam membebaskan tahanan politik. Pada tahun 1963 tahanan politik pertama berhasil dibebaskan yaitu Uskup Agung dari Ukraina Josyf Slipyi yang ditahan di Siberia (AmnestyInternational, 2017). Keberhasilan Amnesty International pada awal berdirinya terbilang memiliki kemajuan yang pesat, dua tahun berselang setelah keberhasilannya membebaskan tahanan politik di Siberia, Amnesty International melanjutkan aksinya dengan

aksi simbolik dengan sebutan *Prisoners Campaign*. Aksi ini dilakukan dengan melibatkan relawannya di berbagai negara untuk mengirimkan kartu pos yang berisi dukungan kepada tahanan politik. Salah satu kontribusi besar bagi Amnesty International adalah dengan melakukan kampanye anti penyiksaan di tahun 1972 dan mendapat pengakuan dari PBB, hingga 12 tahun kemudian pada tahun 1984 PBB mengesahkan *Convention Against Torture* sebagai upaya untuk memerangi penyiksaan didunia (AmnestyInternational, 2017).

Aksi dan kegiatan Amnesty International semakin berkembang dengan berjalannya waktu dan banyak melakukan advokasi terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM di dunia. Sebagai contoh, Amnesty International mengeluarkan daftar nama orang yang hilang di Chile dibawah kepemimpinan diktator Augusto Pinochet, kemudian memulai kampanye penentangan hukuman mati di tahun 1980 dan saat itu hanya Sembilan negara yang menghapuskan hukuman mati, namun di tahun 2014 sudah tercatat 140 negara menghapuskan hukuman mati (AmnestyInternational, 2017).

## 2. Visi dan Misi, Logo, Prinsip Dasar, serta Sumber Pendanaan Amnesty International

Sebagai INGO internasional di bidang penegakan pelanggaran hak asasi manusia, amnesty internasional terus melakukan perjuangan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di dunia. Hal tersebut merupakan tujuan utama dari amnesty international yang mendasari pergerakan ini lahir hingga sekarang. Pada *International Council Meeting (ICM) amnesty international* yang dilaksanakan di Roma, Italia pada 11-15 Agustus 2017, dilakukan beberapa poin amandemen pada visi dan misi AI. Di dalam *Statue of Amnesty International* terkandung visi Amnesty International yaitu untuk menciptakan dunia dimana setiap individu memiliki hak asasi manusia yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan standart hak asasi manusia internasional lainnya. Sedangkan misi dari Amnesty International sendiri yaitu untuk meneliti dan mengupayakan pengadaan pergerakan untuk memperjuangkan, mencegah dan mengakhiri segala tindakan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang didukung dengan pola kerjasama Amnesty International yang bersifat

terbuka terhadap seluruh lapisan masyarakat luas seperti pemerintah, kelompok elit politik, perusahaan, bahkan organisasi pemerintah internasional[ CITATION Amn17 \l 1033 ].

Logo dari Amnesty international sendiri adalah lilin menyala yang dililit oleh kawat tajam, terinspirasi oleh penyalaan lilin pertama kali pada 10 Desember 1961 di depan St Martins Field London. Logo dari Amnesty international ini terinspirasi dari pepatah China yang berbunyi “*better to light a candle than curse the darkness*” dengan mengkombinasikan lilin menyala dan kawat tajam. Kawat tajam merepresentasikan kegelapan tanpa harapan yang bermakna bahwa banyak orang-orang didunia yang dipenjara dan banyak orang yang melupakan mereka. Mereka dipenjara dengan alasan yang tidak adil karena dianggap teralu vokal terhadap pemerintah, dan dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan pemerintah. Sedangkan lilin menyala memiliki makna bahwa Amnesty international akan selalu berkomitmen untuk selalu mengingat bahwa tahanan politik ada di berbagai belahan dunia dan berusaha untuk membebaskan tahanan politik untuk diperlakukan secara adil. Warna kuning sendiri memiliki simbol pemaknaan sebagai bentuk intervensi, hal ini mencerminkan kegiatan Amnesty international yang selalu mencoba melakukan intervensi untuk membebaskan tahanan politik (AmnestyInternational, 2017)

Gambar 2.1 Logo Amnesty International



sumber: <https://www.logodesignlove.com/amnesty-international-logo-design>

Dalam menjalankan kegiatannya Amnesty international menjunjung tinggi nilai dasar yaitu membentuk kelompok komunitas global pembela hak asasi manusia dengan mengedepankan prinsip-prinsip solidaritas internasional, tindakan efektif untuk korban

individu dengan cakupan global, universalitas, dan tidak dapat dipisahkannya hak-hak asasi manusia, ketidakberpihakan dan kemerdekaan, dan rasa saling menghormati (AmnestyInternational, 2017). Didalam usahanya untuk selalu menajalankan berbagai programnya untuk memperjuangkan HAM didunia, Amnesty international selalu mengedepankan tiga prinsip utama yang tidak bisa dibatalakan yaitu netral, tidak memihak, dan mandiri. Netral berarti bahwa dalam usahanya memperjuangkan HAM, Amnesty international tidak akan melihat latarbelakang individua atau kelompok yang diadvokasinya seperti suku, ras, agama, ataupun pandangan politik mereka[ CITATION Fra97 \l 1033 ]. Prinsip kedua adalah tidak memihak, hal ini berarti bahwa Amnesty international akan selalu melakukan usaha perjuangan HAM dimanapun terjadinya pelanggaran HAM, tanpa melihat kondisi geografis suatu negara atau area baik itu dibelahan bumi utara atau selatan dan benua manapun meski awalnya Amnesty international berdiri di Inggris dan baru memiliki cabang di beberapa negeri setelah bertahun-tahun. Prinsip ketiga adalah mandiri, hal ini berarti bahwa Amnesty international adalah organisasi yang mandiri, bahkan dalam hal pendanaan amnesty international tidak menerima pendanaan dari instansi manapun bahkan dari instansi pemerintah[ CITATION NGO12 \l 1033 ].

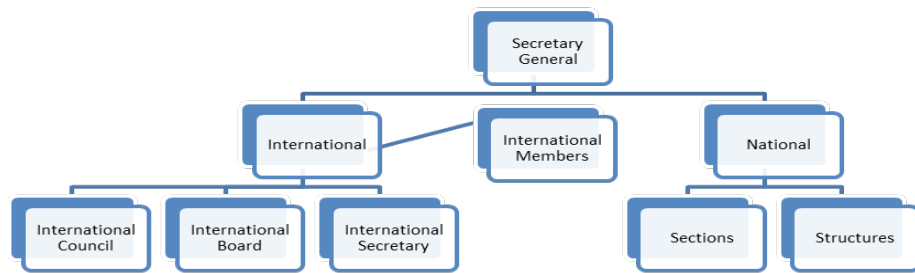
Diawal berdirinya, amnesty international mendapatkan sumber pendanaan hanya berasal dari *fundraising* penjualan produk saja, berselang satu decade setelah banyak cabang diberbagai negara, amnesty international mendapatkan sumber dana dari publikasi di berbagai kantor berita lokal[ CITATION Mor13 \l 1033 ]. Bahkan di tahun 1990-an, amnesty international melakukan konser dengan melibatkan banyak artis dan penyanyi sebagai salah satu sumber pendanaannya. Sumber pendanaan amnesty international berasal dari donasi yang didapatkan dari donatur cabang organisasi diberbagai negara. Hal ini untuk memastikan bahwa amnesty international tidak akan terikat oleh ideologi atau kecenderungan politik manapun[ CITATION Tes14 \l 1033 ]. Hal ini merupakan salah satu strategi amnesty international untuk tetap menjaga keeksistensiannya sebagai INGO yang selalu mengedepankan asas kemandirian.

Meskipun demikian, masih banyak hambatan bagi amnesty international dan organisasi nonprofit lainnya dalam hal pendanaan seperti pelarangan CSO atau *civil society organization* untuk menerima pendanaan internasional dari donator tertentu, contohnya di Sudan dimana CSO harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari HAC atau *Humanitarian Aid Commission* sebelum menerima pendanaan internasional dan HAC hanya akan memberikan persetujuan kepada CSO menyediakan bantuan kemanusiaan dengan aktivitas yang terbatas [ CITATION Rut15 \l 1033 ]. Contoh lainnya di Venezuela dengan *Law on Defense Political Sovereignty and National Self-Determination* melarang organisasi atau CSO dengan tujuan politik atau pembelaan hak-hak politik untuk menerima sumber pendanaan selain dari sumber nasional saja [ CITATION Rut15 \l 1033 ].

### 3. Struktur, Keanggotaan, dan Pengambilan Keputusan Amnesty International.

Di dalam *statute of amnesty international*, Amnesty international memiliki tiga keistimewaan yaitu yang pertama adalah bebas dari segala bentuk ikatan dengan pemerintah, ideologi, pandangan politik, kepentingan ekonomi, dan kepercayaan manapun. Kedua, menjunjung asas demokrasi dan memiliki struktur organisasi yang mandiri. Ketiga adalah sumber pendanaan Amnesty international berasal dari sumbangan donator dan bersifat sukarela, Amnesty international tidak menerima donor dari segala bentuk instansi pemerintahan manapun (AmnestyInternational, 2017). Di dalam poin kedua diterangkan bahwa Amnesty international memiliki struktur keanggotaan yang mandiri, hal ini berarti bahwa meskipun sifat keanggotaannya sukarela tetapi Amnesty international juga memiliki pekerja profesional di bidangnya dan masuk dalam struktur keanggotaan.

Gambar 3.2 Struktur Amnesty International



sumber : <https://www.amnesty.org/en/about-us/how-we-run/structure-and-people/>

Di dalam struktur amnesty international, *Secretary General* berada di puncak kepemimpinan yang merupakan koordinator amnesty international dilevel nasional maupun internasional. Di bagian nasional amnesty international terdiri dari bagian yaitu *sections* dan *structure* yang berada di level nasional dan regional. *Sections* bisa disebut sebagai negara dengan dipimpin oleh dewan direksi sedangkan *structure* adalah sections yang memiliki tanggungjawab sama tetapi memiliki keterbatasan keanggotaan dan jumlah staff. Apabila di suatu negara tidak terdapat *sections* ataupun *structure*, maka keanggotaan negara tersebut akan masuk kedalam *international members*. *Structure* memiliki beberapa tugas utama seperti (AmnestyInternational, 2017):

- Melakukan lobi terhadap pemerintah lokal.
- Melakukan kampanye, penggalangan dana, dan komunikasi dengan sections dan structure di wilayah regional.
- Mengembangkan strategi advokasi dan melakukan perekrutan tenaga sukarela di masing-masing sections.
- Melakukan proyek penelitiannya sendiri yang berfokus pada pelanggaran HAM yang terjadi di masing-masing sections, dan penelitian yang dilakukan harus sudah mendapat persetujuan dari international board

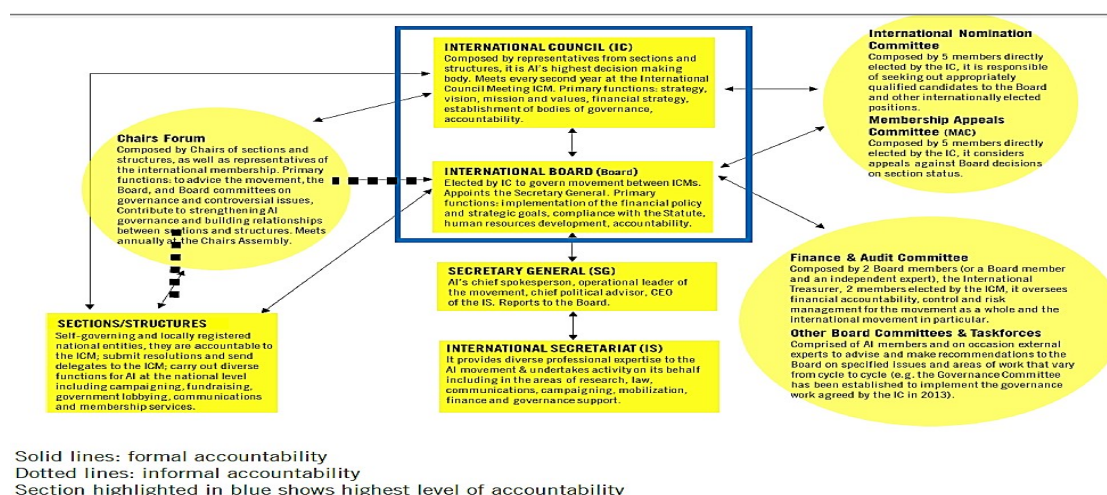
.Di dalam bagian international terdapat tiga badan yaitu *international council* (IC), *international board* (IB) dan *international secretary* (IS) yang menjalankan tugasnya masing-masing. *International council* merupakan badan perwakilan dari *sections* dan *structure* yang ada diseluruh dunia dimana dipimpin oleh seorang ketua dewan. Setiap *sections* dan *structure* memiliki hak untuk menunjuk dewan direksi dari *sections* dan *structure* lain untuk duduk sebagai IC yang dipilih setiap dua tahun sekali. Badan kedua adalah *international board* (IB) yang sebelumnya dikenal dengan *international executive committee* (IEC). IB terdiri dari delapan orang dan *IB Treasurer* yang dipilih oleh IC sekaligus bertanggungjawab kepada IC dan mengadakan pertemuan setidaknya dua kali dalam setahun. IB sendiri berfungsi sebagai badan pengatur internal organisasi, memformulasikan strategi advokasi terbaru, memastikan sumber dana yang masuk, dan memutuskan segala perubahan struktur di tingkat nasional seperti penerimaan status negara anggota baru sebagai *sections* (AmnestyInternational, 2017). Badan ketiga adalah *international secretary* (IS) yang dijalankan oleh kurang lebih 500 anggota staff profesional dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. IS sendiri memiliki fungsi utama yaitu[ CITATION Hil13 \l 1033 ]:

- Melakukan penelitian dan pelaporan.
- Memastikan amnesty international diseluruh dunia kompak satu suara terhadap isu pelanggaran HAM yang terjadi dan memberikan pengaruh yang kuat kepada masyarakat.
- Menyediakan analis hukum yang ahli untuk membantu penelitian amnesty international, dan membentuk basis pelobi ahli dalam organisasi pemerintah internasional.
- Melakukan monitoring terhadap keuangan amnesty international
- Mendukung dan memelihara system yang dibutuhkan sehingga amnesty international siap melayani 24 jam sehari.



Pengambilan keputusan dalam amnesty international dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi, akuntabilitas dan transparansi. *International Council Meeting* atau ICM adalah rapat tertinggi di dalam amnesty international dimana proses voting dilaksanakan. Namun sebelum memasuki ICM terlebih dulu setiap *sections dan structure* melakukan *Chairs Forum* di masing-masing negara yang akan memilih *chairs* atau perwakilan mereka untuk menghadiri ICM. Kemudian setelah dilakukan *assessment* dan pemilihan *chairs* di tingkat nasional, maka mereka akan menjadi representasi negara dalam ICM. *Chairs* merupakan orang terpilih yang mewakili *sections, structure* dan *international members* dan mereka juga memiliki hak suara untuk digunakan dalam pengambilan keputusan di dalam ICM. *Sections, structure* dan *international members* kemudian akan masuk menjadi bagian dari *international board* dan memiliki hak untuk mengajukan kebijakan, program, visi dan misi, dan resolusi di dalam ICM dimana mereka akan berdiskusi mengenai hal tersebut dan akan melakukan voting dalam setiap keputusan yang diambil (AmnestyInternational, 2014). Metode pengambilan keputusan dalam amnesty international adalah sebagai berikut (AmnestyInternational, 2016):

Gambar 2.3 Proses pengambilan keputusan Amnesty International.



Sumber: <https://accountablenow.org/wpcontent/uploads/2017/01/Amnesty-International-Accountability-Report-2016.pdf>.

Pemisahan kekuasaan di dalam ICM adalah berikut, yang menjadi chairs dalam badan IC telah dipilih oleh anggota IC di dalam ICM tahun sebelumnya, sedangkan IB bersifat non-eksekutif. Selanjutnya keputusan dari IC akan dibawah oleh IS dan Secretary General beserta

panduan dari IB. IB sendiri bertugas untuk menunjuk, mengawasi dan mengevaluasi Secretary General sehingga pada dasarnya hubungan kekuasaan antar masing-masing badan sangat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dalam amnesty international (AmnestyInternational, 2014).

## **B. Agenda Amnesty International Dalam Penegakan Pelanggaran HAM di Dunia**

Dalam rangka penegakan HAM di dunia, amnesty international selalu menerapkan kebijakan yang strategis dan terencana. Agenda yang dilakukanpun semakin bervariasi dan dapat berbeda pengaplikasiannya di tiap kasus di negara atau area yang berbeda. Di awal berdirinya amnesty international advokasi kasus hanya berfokus pada pembebasan tahanan politik dan juga tahanan akibat limitasi berekspresi yang saat itu masih diteka oleh pemerintah. Amnesty international berkomitmen untuk selalu menentang penindasan kebebasan berekspresi dengan prinsip non-intervensi dari segala bentuk intervensi politik, hal ini yang mendorong amnesty international untuk selalu berusaha melakukan penelitian dan mempromosikan HAM didunia[ CITATION Ann01 \l 1033 ]. Seiring dengan perkembangan zaman, advokasi amnesty international tidak lagi hanya berfokus pada dua hal tersebut tetapi menangani masalah yang semakin kompleks. Setiap diadakan ICM, amnesty international akan selalu menyusun agenda prioritas yang nantinya akan dilakukan observasi oleh setiap *sections* dan *structure*, tetapi pada dasarnya segala bentuk advokasi amnesty international berfokus pada enam area yaitu[ CITATION Mar04 \l 1033 ].

- Hak perempuan, anak, kaum minoritas dan masyarakat adat.
- Mengakhiri perbudakan dan penyiksaan.
- Menghentikan hukuman mati.
- Memperjuangkan hak pengungsi.
- Pembebasan tahanan politik.

- Perlindungan martabat manusia.

Secara spesifik beberapa tujuan amnesty international saat ini seperti memastikan persidangan yang adil dan tepat kepada terdakwa, mengakhiri *extra judicial executions*, memperjuangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, melawan impunitas dari sistem peradilan, dekriminalitas terhadap aborsi, menghentikan penggunaan tantara dan buruh anak, melindungi hak LGBT, dan memperjuangkan hak pengungsi, migran dan pencari suaka[ CITATION Jan11 \l 1033 ].

Dalam melakukan aksinya dalam rangka penegakan HAM, amnesty international melakukan berbagai gerakan dan agenda yang disusun sedemikian rupa guna memperjuangkan tujuan utama mereka. Agenda yang pertama adalah publikasi dan promosi tentang penelitian yang akan amnesty international lakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai dalam ICM. Hal pertama yang dilakukan oleh amnesty international adalah berkoordinasi dengan sections dan structure dimana akan di lakukan penelitian guna memperoleh data dan informasi mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di daerah tersebut. Setelah dilakukan penelitian maka hasil penelitian tersebut akan dimasukkan kedalam laporan tahunan dan akhirnya akan dilakukan publikasi terhadap kasus yang terjadi sekaligus rekomendasi yang diberikan oleh amnesty international terhadap kasus yang terjadi. Terkadang amnesty international juga melakukan publikasi dalam jangkauan yang luas seperti yang dilakukan pada 2017 dan dilaporkan dalam draft berjudul “*The State of the World’s Human Right 2017/2018*” yang berisi laporan dari 159 negara tentang perkembangan advokasi kasus pelanggaran HAM di negara mereka (AmnestyInternational, 2018). Sebagai contoh di tahun 2016 amnesty international melakukan publikasi terhadap kebijakan perlindungan pekerja seksual di Norwegia, Hong Kong, Papua New Guinea dan Argentina mengingat hak pekerja seksual kadang masih terabaikan dan mereka rawan terhadap diskrimansi baik dari pemerintah dan juga penduduk lokal (AmnestyInternational, 2016). Di dalam publikasi tersebut diungkapkan bahwa pekerja seksual sering mendapat diskriminasi

bahkan dari polisi dan tidak jarang mereka diabaikan apabila melakukan pelaporan terhadap tindak kriminal yang mereka alami. Dalam laporan tersebut juga membuktikan bahwa pekerja seksual tidak mendapat perlindungan hukum dari negara. Publikasi yang diterbitkan amnesty international ini menjadi langkah awal bagi *sections* dan *structure* untuk memulai strategi advokasi mereka.

Agenda kedua yang dijalankan amnesty international adalah demonstrasi publik dan kampanye. Demonstrasi publik yang dilakukan amnesty international dapat bersifat langsung dengan turun ke jalan dan juga dapat bersifat tidak langsung melalui berbagai jenis media masa seperti surat kabar, majalah, atau bahkan amnesty international akan langsung melakukan kontak dengan badan PBB. Kontak langsung yang dilakukan oleh amnesty international dengan badan PBB merupakan wujud keberhasilan amnesty international dalam eksistensinya memperjuangkan HAM terlebih lagi setelah berhasil mendorong PBB mengesahkan *Convention Against Torture* tahun 1984 membuktikan bahwa amnesty international merupakan INGO yang akan selalu bersedia dalam memperjuangkan HAM yangmana selaras dengan visi badan PBB yaitu UNHRC[ CITATION Tha94 \l 1033 ]. Sebelum memulai strategi kampanyenya, amnesty international terlebih dulu akan menyusun kriteria terlebih dahulu dalam memberikan respon terhadap krisis yang terjadi dan barulah menetapkan tujuan utama dari kampanye yang akan mereka lakukan, kemudian memobilisasi demonstran dan menambah jangkauan kampanye apabila isu yang terjadi melibatkan isu regional. Teknik kampanyenyapun beragam, mulai dari penulisan surat dan petisi, melalui kegiatan publik dan protes kontak langsung dengan kedutaan, bahkan amnesty international dapat melakukan kampanye dengan melibatkan selebriti-selebriti ternama. Pelibatan selebriti ini dinilai cukup efektif mengingat mereka mempunyai banyak pengikut, dan sebagai tokoh publik mereka dapat memberikan pengaruh langsung kepada pengikutnya dengan membentuk opini-opini. Sebagai contoh adalah pada Oktober 2017 melalui *amnesty international* USA beberapa tokoh publik seperti Bono, Ben Stiller, Mark Ruffalo, Whoopi Goldberg, Annie

Lenox, dan Patrick Stewart menandatangani surat yang berisi permintaan pembebasan aktivis di Turki yang telah ditahan selama 100 hari (AmnestyInternational, 2017).

Contoh dari demonstrasi publik yang dilakukan amnesty international adalah demonstrasi dengan nama “Brave” yang dilakukan di London pada Mei 2017 mendesak dunia internasional untuk memberikan jaminan perlindungan bagi aktivis penegak HAM di dunia, mengingat serangan terhadap aktivis HAM semakin meningkat dan juga amnesty international mendesak PBB untuk memenuhi komitmennya dalam memberikan perlindungan terhadap aktivis[ CITATION Rid17 \l 1033 ]. Contoh lain adalah penggunaan senjata untuk membunuh demonstran di Nikaragua, yang sejak bulan April 2018 telah menewaskan setidaknya 300 demonstran di negara tersebut[ CITATION Lak18 \l 1033 ]. Demonstrasi dan kampanye akan terus menjadi salah satu strategi bagi amnesty international untuk memberikan tekanan bagi pemerintah lokal dalam isu tertentu. Di Polandia misalnya, demonstran melakukan protes akibat tindakan represif yang dilakukan polisi kepada demonstran dalam menentang kebijakan terbaru, mereka melakukan protes dengan bagian tubuh yang terluka seperti tangan yang diperban dan diberi keterangan bahwa pihak polisi yang melakukan kekerasan hingga melukai para demonstran[ CITATION Hof18 \l 1033 ].

Agenda ketiga adalah pengadaan pendidikan dan pembangunan kesadaran dini masyarakat tentang HAM. Sosialisasi nilai pentingnya penegakan HAM juga dilakukan amnesty international melalui jalur Pendidikan karena amnesty international sadar akan pentingnya menanamkan nilai dasar pemahaman tentang HAM kepada siswa. Bahkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan adalah salah satu tujuan dari amnesty international sendiri. Kesadaran akan pentingnya HAM juga akan tercipta dengan aksi yang dilakukan amnesty international seperti petisi, kecaman, ataupun demonstrasi sebagai wujud respon terhadap pelanggaran HAM yang terjadi, dan diharapkan masyarakat juga ikut membantu amnesty international dalam mewujudkan tujuan amnesty international. Masyarakat juga

dapat berperan aktif dalam isu HAM sendiri, seperti contoh adalah pelaporan dari komunitas masyarakat di Papua tentang pembunuhan hampir 100 penduduk lokal oleh aparat negara akibat menyuarkan kemerdekaan Papua, tetapi aparat negara yang terlibat tidak dijatuhi hukuman apapun [ CITATION Uta18 \l 1033 ]. Hal ini mendorong Amnesty International untuk menjadikan hak impunitas sebagai salah satu agenda yang harus dihapuskan karena tersangka tidak dapat diadili secara hukum dan hal ini melanggar hak hidup orang lain.

Agenda ke empat adalah kerjasama dengan organisasi HAM lokal yang berada di masing-masing *sections* dan *structure*. Kerjasama yang dilakukan Amnesty International dengan organisasi HAM lokal sangat diperlukan guna membantu dan memudahkan mobilisasi advokasi Amnesty International di dalam sebuah negara. Organisasi HAM lokal ini juga menjadi salah satu aktor penting bahkan sejak Amnesty International melakukan penelitian dan publikasi terhadap isu pelanggaran HAM yang terjadi. Sebagai contoh adalah dalam kasus Timor Leste, dimana tidak diperbolehkannya segala bentuk bantuan dan intervensi dari NGO internasional dalam kasus tersebut selain organisasi Katolik yang mana bantuan kemanusiaan dan advokasi HAM tidak bisa dijalankan [ CITATION Dib14 \l 1033 ]. Dalam kasus seperti ini dibutuhkan organisasi lokal yang dapat menjadi jembatan bagi Amnesty International untuk selalu dapat memberikan advokasi penegakan HAM di sebuah negara.

Sejak berdirinya Amnesty International di tahun 1961 sudah banyak prestasi yang ditorehkan oleh Amnesty International dalam isu penegakan HAM di dunia. Dengan melalui agendanya yang selalu mempersiapkan strategi advokasinya dengan matang, Amnesty International menjadi NGO yang tetap eksis hingga sekarang. Beberapa keberhasilan Amnesty International yang tercatat antara lain disepakatinya *Convention Against Torture* di tahun 1984 yang merupakan puncak perjuangan Amnesty International sejak satu dekade sebelumnya, pembentukan *International Criminal Court* di tahun 1998, Kampanye *Arms Trade Treaty* yang akhirnya disetujui oleh PBB, Disetujuinya *Ottawa Treaty* yang melarang

penggunaan ranjau darat, amnesty international juga berhasil mengumpulkan 13 juta tandatangan untuk mendukung Universal Declaration of Human Right. Sedangkan di era modern amnesty international juga berhasil mendorong PBB untuk mengeluarkan kebijakan tentang perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak, berhasil memberikan rekomendasi perlindungan terhadap pekerja seksual dan perlindungan hak masyarakat adat. Di tahun 2015 amnesty international melalui UNGA juga berhasil menekan PBB untuk mengadopsi resolusi perlindungan HAM bagi aktivis penggiat HAM [ CITATION Bro17 \l 1033 ]. Meskipun sebenarnya *Declarations on Human Right Defender* sudah ada sejak tahun 1988 tetapi pada implementasinya masih banyak pelanggaran yang terjadi [ CITATION Ben15 \l 1033 ].

### **C. Amnesty International sebagai Global Social Movement**

Pada dasarnya tipe NGO sendiri terbagi dalam dua garis besar yaitu tipe *development* dan juga *mobilization*. Tipe *development* sendiri berarti tipe NGO yang mendasari gerakannya dengan pendekatan yang cenderung membangun kerjasama dengan pemerintah untuk mencapai tujuannya. Sedangkan tipe *mobilization* memiliki definisi yang berlawanan dengan tipe *development* yaitu tipe NGO ini lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dengan menggunakan pendekatan untuk memobilisasi rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai atau tidak akomodatif terhadap kepentingan rakyat. Selain ciri tersebut, NGO juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jarak politiknya yaitu tipe *high level partnership* yang berarti NGO ini membangun kemitraan dengan pemerintah, *high level politics* yang cenderung kritis dan *empowerment at the grassroots* yang lebih mengutamakan pemberdayaan. Pada kenyataannya banyak dari NGO terlibat dalam penguatan hak-hak sipil dan politik di masyarakat, juga dalam mendemokratisasikan proses-proses politik informal melalui proses pelatihan ditingkat *grassroot* atau akar rumput [ CITATION Suh03 \l 1033 ].

Amnesty international sendiri sebagai social movement NGO dapat dikategorikan sebagai NGO dengan tipe *mobilization* dengan ciri *high level politics* dimana dalam kasus kebijakan pencari suaka pemerintah Australia, amnesty international cenderung kritis terhadap kebijakan tersebut dengan memobilisasi masyarakat global akan pentingnya perlindungan hak-hak pengungsi. Selain itu amnesty international dapat digolongkan sebagai NGO reformis dimana NGO melihat keadaan yang terjadi dimasyarakat sebagai akibat dari tidak berfungsinya elemen-elemen sosial politik yang ada dimana rakyat dan komunitas-komunitas kurang memiliki akses untuk terlibat dan berpartisipasi dalam politik pembangunan[ CITATION Arb85 \l 1033 ]. Dalam masalah pencari suaka, amnesty international memiliki tujuan utama untuk merubah struktur demi menciptakan dunia yang lebih baik terutama bagi para pencari suaka. Aktivitas yang dilakukan oleh amnesty international sendiri merupakan manifestasi dari konsep social movement NGO melalui beberapa aktivitas yang dilakukannya untuk menarik perhatian dunia dalam masalah kebijakan Australia dalam isu pencari suaka.

Wujud kritik amnesty international terhadap kebijakan Australia dalam masalah pencari suaka didasari pada dua hal yaitu amnesty international mendefinisikan masalah ini dengan tidak cukupnya visi mobilisasi dan melihat bahwa masalah ini tidak akan memberikan kejelasan terhadap pencari suaka. Amnesty international melihat bahwa pencari suaka adalah korban akibat kebijakan Australia dan melihat bahwa masalah ini bukan prioritas global, sehingga amnesty international tidak menemukan visi yang sama dari berbagai aktor sehingga sulit untuk melakukan mobilisasi karena perbedaan visi tersebut. Sedangkan bagi pencari suaka, kebijakan Australia yang cenderung selalu berubah tidak pernah menguntungkan bagi pencari suaka sendiri. Sebagai contoh adalah amandemen *Migration Act* di tahun 2001 yang mengeluarkan beberapa pulau terluar Australia seperti pulau Cocos, Christmas, dan Ashmore dari zona migrasi[ CITATION Phi12 \l 1033 ]. Dengan kebijakan ini, pencari suaka tidak akan pernah bisa mengajukan status pengungsi mereka karena zona teritori terluar ini sudah



dikeluarkan, sehingga dapat dikatakan mereka tidak akan pernah mendapatkan status sebagai pengungsi dan tidak akan pernah mencapai Australia. Selain hal tersebut, penutupan pusat detensi di pulau Manus yang diputuskan bersifat illegal oleh Mahkamah Agung PNG juga menimbulkan kritik dari amnesty international. Pada oktober 2017 pusat detensi di pulau Manus ditutup, tetapi Australia belum dapat memastikan tempat baru yang akan ditinggali oleh pencari suaka, meski pusat detensi di kota Lorengau akan disiapkan tetapi tempat tersebut belum siap untuk ditempati[ CITATION Fox17 \l 1033 ]. Tidak ada kejelasan dimana akhirnya pencari suaka ini akan ditempatkan, bahkan setelah tanggal 31 Oktober akan dihentikan pasokan makanan, air, dan listrik di pusat detensi di pulau Manus. Hal-hal tersebut beberapa alasan bagi amnesty international sebagai *social movement NGO* dalam kritiknya terhadap kebijakan Australia dalam isu pencari suaka karena dinilai melanggar hak asasi manusia, padahal Australia sendiri merupakan negara peratifikasi *Convention on Refugee* yang harusnya memberikan perlindungan kepada pencari suaka. Australia harusnya memenuhi kewajiban hukum internasional berkaitan dengan isu pencari suaka sesuai *Convention on Refugee 1951* dan *Protocol 1967* dengan memberikan perlindungan kepada pencari suaka, jaminan hak-hak dan kebebasan fundamental bagi pencari suaka tanpa adanya diskriminasi[ CITATION Tam18 \l 1033 ]. Kebijakan Australia ini dipandang tidak sesuai dengan visi amnesty international yaitu memastikan setiap individu untuk memiliki dan menikmati haknya sesuai yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan standart hak internasional lainnya (AmnestyInternational, 2017).

Sebagai *social movement NGO*, amnesty international juga memiliki ciri yaitu bekerja dalam lingkup global dan dalam menjalankan advokasinya amnesty international juga melibatkan banyak aktor lain yang melewati batas negara dengan cara mengkomunikasikan ide dan gagasannya dengan menggunakan media yang sudah maju. Amnesty international sendiri memiliki cabang di hampir dari 160 negara di dunia yang terdiri dari sections dan structure dimana bekerja secara strategis dalam advokasi kasus. Amnesty international memiliki

sections di Australia dengan nama Amnesty International Australia yang bertugas untuk melakukan penelitian dan pelaporan atas pelanggaran HAM di wilayah Australia dan Oceania. Sections amnesty international di Australia ini merupakan aktor yang beroperasi melewati batas negara dengan melakukan pelaporan kepada amnesty international pusat tentang perkembangan kebijakan Australia terhadap pencari suaka. Fokus yang dijalankan amnesty international sebagai *social movement NGO* adalah berusaha untuk mengubah kebijakan dan sistem struktural dari kebijakan Australia melalui NGO dalam level domestik maupun internasional, hal inilah yang menjadi salah satu ciri dari strategi ke empat NGO [ CITATION Cla02 \l 1033 ]. Dalam usahanya mempengaruhi kebijakan Australia, amnesty international melakukan aksinya didukung oleh INGO HAM internasional lainnya seperti Save the Children dan juga NGO lokal di Australia seperti Refugee Council of Australia yang merupakan jembatan bagi amnesty international untuk menyuarakan aksinya [ CITATION RCO13 \l 1033 ].

Dalam skripsi ini melihat bahwa amnesty international pada dasarnya merupakan INGO yang merupakan tipe social movement dengan sifat mobilization yaitu berusaha mempengaruhi kebijakan negara dengan kritik dan strategi pergerakannya. Amnesty international dapat dikategorikan sebagai NGO reformis dimana melihat bahwa kondisi yang terjadi pada pencari suaka merupakan akibat dari kegagalan fungsi elemen-elemen politik dimana Australia seakan mengabaikan kritik dari dunia internasional terhadap kebijakannya yang dianggap melanggar hak bagi pencari suaka.